

# Komunikasi dan Politik<sup>1</sup>

Oleh : Adiyana Slamet, S.Ip., M.Si

Seseorang yang menggeluti komunikasi politik, akan berhadapan dengan masalah yang rumit, karena komunikasi dan politik merupakan dua paradigma yang berbeda. Disatu sisi komunikasi dilihat suatu proses pertukaran pesan antara orang yang melakukan interaksi. Dalam keadaan lain, kata politik dimaknai suatu kegiatan yang terorganisasi, dengan tujuan yang telah tersusun secara sistematis oleh individu, kelompok, dan masyarakat dalam sistem sosial. Dua kata ini berbeda penafsirannya tetapi dalam praktek politik, kedua kata tersebut berada pada posisi yang sama. Artinya komunikasi dan politik menjadi kegiatan dalam sistem politik kekuasaan negara dengan tujuan yang telah diatur secara sistematis oleh penguasa.

Dalam mewujudkan tujuan politik, komunikasi mempunyai peranan yang penting sebagai instrumen penghubung dalam aktivitas politik. Harus diakui bahwa tidak akan tercapai tujuan dalam sistem politik, tanpa diikuti kegiatan komunikasi terlebih dahulu. Begitu juga sebaliknya, komunikasi akan berproses pada tujuan politik, apabila pesan yang disampaikan mengandung makna yang sama pada orang yang mengikuti arus politik.

Dalam fenomena tersebut, komunikasi dan politik merupakan dua kata yang berbeda, tetapi dapat menjadi satu paradigma dalam pengamatan terhadap proses politik di masyarakat. Orang sering menyebut komunikasi politik yang merupakan proses pertukaran pesan antar orang yang melakukan kegiatan politik, sebagai aktor dengan arah dan tujuan pesan telah ditentukan oleh tatanan mekanisme yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, Golding (1996) mengatakan bahwa:

“Komunikasi politik sebagai pandangan pesimistik yang menceritakan terhadap muatan politik sebagaimana terdistribusi dalam berbagai bentuk melalui media massa terhadap sebagian besar *audiens* yang didominasi pada berbagai sumber dengan cakupan kepentingan media itu sendiri, bukan kepentingan warganegara atau proses demokratis. Terhadap ruang lingkup terbatas bagi para komunikator massa dalam menambahkan unsur-unsur atau bumbu-bumbu politik, karena

---

<sup>1</sup> Pembahasan dalam kuliah pertemuan pertama

batasan-batasan yang telah disebutkan atau karena meningkatkan pengaruh norma-norma objektivitas politik. Pengaruh terlalu kuat dari tampilan mendapatkan perhatian dalam arah liputan politik telah didokumentasikan, seperti dalam ketidakseimbangan waktu dan ruang yang ditunjukkan pada prosedur dan personalitas-personalitas dibandingkan dengan masalah-masalah substansi politik. Dalam pengertian lain komunikasi politik berarti citra rasa mengenai berita-berita tentang politik serta sebab-sebab utama yang harus dibentuk dalam suatu kombinasi, sosialisasi melalui media dan struktur sosial.”

Dan Nimmo (Surjaman, 2005 : 5) menguraikan terlebih dahulu pengertian komunikasi dan politik serta hubungan keduanya. Bahwa komunikasi merupakan pengalihan informasi untuk memperoleh tanggapan; pengkoordinasian makna antara seseorang dan khalayak; saling berbagi informasi, gagasan atau sikap ; saling berbagi unsur-unsur perilaku atau modus kehidupan melalui perangkat-perangkat aturan; penyesuaian pikiran, penciptaan perangkat simbol bersama di dalam pikiran para peserta, atau komunikasi bukan sekedar penerusan informasi dari suatu sumber kepada publik; lebih mudah dipahami sebagai penciptaan kembali gagasan-gagasan informasi oleh publik jika diberikan petunjuk dengan simbol, slogan, atau tema pokok. Adanya transaksi sebagai modus untuk memikirkan perilaku manusia, dengan maksud, **pertama**, makna berbagai hal bagi orang-orang timbul dari tindakan bersama yang dilakukan oleh orang-orang itu; **Kedua**, tindakan itu berupa pengamatan berbagai hal dan penempatan arah perbuatan berdasarkan interpretasi personal.

Fenomena komunikasi politik tidak berbeda dengan fenomena komunikasi dan fenomena politik, baik komunikasi maupun politik sebagai serbahadir (*ubiquitous*) (Arifin, 2003 : 24). Artinya komunikasi dan politik itu berada di manapun dan kapan pun juga. Karena setiap orang berkomunikasi dan berpolitik. Maka dalam rangka menjelaskan hubungan antara komunikasi dan politik dapat diuraikan dalam tiga bahasan, **Pertama**, Memandang gejala komunikasi sebagai variabel bebas (*independent variable*) yang justru menjadi penyebab bagi gejala politik, seperti bagaimana pers di negara-negara maju punya andil besar dalam

mempengaruhi pengambilan keputusan politik; **Kedua**, memandang gejala komunikasi sebagai akibat dari perlakuan politik, jadi politiklah yang dianggap menentukan; **Ketiga**, memandang gejala komunikasi dan politik sebagai interaksi yang kompleks, sehingga membutuhkan pendekatan (perspektif) yang khusus. (Panuju, 1995 : 11-13) .

Demikian juga dalam literatur ilmu politik menurut Sanit (Suwardi 2002 : 44), komunikasi diperlukan sebagai salah satu variabel yang menentukan proses politik, lebih jauh Sanit mengemukakan bahwa :

”Efektif dan demokratik tidaknya komunikasi, merupakan persyaratan bagi berlangsungnya fungsi-fungsi kehidupan politik untuk mengembangkan diri dan sekaligus bekerja menanggulangnya. Komunikasi politik pada khususnya menjembatani perbedaan atau konflik visi, ideologi, dan atau kepentingan diantara para pembuat kebijakan publik dan diantara mereka dengan publik sehingga dapat disepakati alternatif solusi masalah yang dianggap tepat. Dengan begitu problem pembangunan politik dipahami lewat pengaruh pola dan proses komunikasi yang dimanfaatkan oleh para pemain politik itu sendiri”.

Sehingga pentingnya komunikasi dalam pencapaian sasaran-sasaran politik, seperti diakui oleh Greber (1981 : 23) bahwa ”Sebagian besar aktivitas politik adalah permainan kata-kata. Politisi berhasil meraih kekuasaan karena keberhasilannya berbicara secara persuasif kepada para pemilih dan kepada elit politik”. Bahasa politik (bahasa yang digunakan dalam konteks politik) dan apa yang membuat bahasa verbal maupun nonverbal menjadi politis bukanlah karena bentuk atau kosa kata, melainkan karena substansi informasi yang dihadirkan, setting dimana informasi yang disebarkan maupun karena fungsi yang dijalankan (Arriane dalam Mulyana dan Solatun, 2007 : 30).

Sebagaimana menurut Ilmuan Politik Mark Roelofs, mengatakan bahwa cara sederhana mengartikan politik adalah pembicaraan : atau lebih tepat, kegiatan

politik (berpolitik) adalah berbicara. Lebih lanjut ia menekankan bahwa politik tidak hanya pembicaraan, juga tidak semua pembicaraan adalah politik. Akan tetapi "hakekat pengalaman politik, dan bukan hanya kondisi dasarnya ialah bahwa ia adalah kegiatan berkomunikasi antara orang-orang." Pembicaraan menurut Bell (1975 : 69 dalam Arifin : 3) adalah pembicaraan kekuasaan, pembicaraan pengaruh dan pembicaraan otoritas, Nimmo (2005 : 82) menambahkan pembicaraan politik yaitu pembicaraan tentang konflik, karena melalui pembicaraan para komunikator politik menyelesaikan perselisihan baik dalam bentuk kompromi atau konsensus.

Dalam bukunya Dan Nimmo (2005 : 8) bahwa menggunakan politik hanyalah untuk mengartikan kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial. Karena dalam berbagai hal orang berbeda satu sama lain baik jasmani, bakat, emosi kebutuhan, cita-cita, inisiatif, perilaku, dan sebagainya. Kadang-kadang perbedaan ini merangsang argumen, perselisihan dan perpecahan. Sehingga jelas proses politik berhubungan dengan komunikasi, atau pembicaraan dalam inklusif yang berarti segala cara orang bertukar simbol, kata-kata yang dituliskan dan diucapkan, gambaran gerakan, sikap tubuh, perangai dan pakaian.

Lebih lanjut menurut Mozin dalam tulisannya (2006), bahwa berbagai pandangan tentang komunikasi dan politik saling berhubungan dan bahkan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, sehingga keduanya berinteraksi dalam studi komunikasi politik. Kemudian menurut Bell (Nimmo, 1975 : 15-69) komunikasi bukan saja sebagai kontrol sosial tetapi telah mengandung makna politik, juga menurut **Nimmo** (1999 : 9-10) banyak aspek kehidupan politik yang dapat dilukiskan sebagai kegiatan komunikasi dan begitupun sebaliknya komunikasi dapat meliputi kegiatan politik. Karena dalam politik yang menjadi aspek penting adalah pembicaraan, atau lebih tepat kegiatan politik (berpolitik) adalah kegiatan berbicara, yang dilakukan oleh para politikus, aktivis, atau profesional.

Definisi politik lainnya yang berhubungan dengan komunikasi lisan ataupun tertulis, seperti menurut Robert H Soltau dalam karyanya "An

*Introduction to Politics*” (1950) bahwa ilmu politik adalah berkaitan dengan maksud dan tujuan negara beserta lembaga-lembaga yang akan merealisasikannya serta hubungan dengan individual atau anggota dalam negara. Juga mengkaji pemikiran-pemikiran manusia politik yang mengembangkan dan menuangkan dalam bentuk lisan atau juga tulisan. (Faturohman dan Wawan : 2001 : 3) Lebih lanjut dalam komunikasi politik Bell (1975 : 16) mengklasifikasikan dalam tiga jenis pembicaraan, **Petama**, pembicaraan kekuasaan, yaitu mempengaruhi orang lain dengan ancaman, janji, penyusunan dan pemerasan. Pembicaraan ini menekankan pada sanksi-sanksi; **Kedua**, pembicaraan pengaruh, yaitu pembicaraan yang dilakukan dengan penuh nasehat, dorongan, permintaan dan peringatan. Pembicaraan ini menekankan pada prestise, reputasi, kredibilitas, dan kapabelitas; dan **Ketiga**, pembicaraan otoritas, yaitu pemberian perintah oleh yang berkuasa sehingga penguasa yang syah ialah suatu otoritas dan memiliki hak untuk dipatuhi. Pembicaraan ini lebih menekankan pada daya tarik pribadi penguasa, adat istiadat atau kedudukan resmi. Karena politik sendiri memiliki pusat perhatiannya (*focus interest*) pada kekuasaan (*power*), legitimasi (*legitimate*) serta kewenangan (*authority*).

Sesungguhnya cukup banyak pendapat para pakar yang menunjukkan adanya kedekatan antara komunikasi dan politik. Pye (1983 : 6 dalam Arifin) misalnya mengatakan bahwa suatu jaringan (komunikasi) mampu memperbesar dan melipat gandakan ucapan-ucapan (pembicaraan) dan pilihan-pilihan individual sehingga dalam hal ini tak akan ada suatu politik yang dapat merentangkan suatu bangsa. Bahkan Schacter (dalam Fisher, 1986 : 10) dengan tegas menulis bahwa komunikasi adalah mekanisme untuk melaksanakan kekuasaan. Begitu juga dengan arti komunikasi sebagai proses, Jurgen Habermas (Dwidjowijoto, 2004 : 54-55) komunikasi diartikan sebagai proses perebutan pengaruh yang paling demokratis. Bahkan menurut Shacter (Fisher, 1990 : 9-16) dengan tegas mendefinisikan komunikasi sebagai mekanisme untuk melaksanakan kekuasaan. Selanjutnya Astrid Susanto (1995 : 2) melanjutkan definisi Hebermas diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan

komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik.

Dengan demikian melalui kegiatan komunikasi politik terjadi pengaitan masyarakat sosial dengan lingkup negara sehingga komunikasi politik merupakan sarana untuk pendidikan politik atau kesadaran warga dalam hubungan kewarganegaraan. Kemudian pendapat Astrid tersebut lebih merujuk kepada produk hukum yang mengikat dan bersifat regulatif, yang merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan dan kebijakan publik yang dilakukan oleh pihak komunikator politik, sebagai persilangan pengaruh dan aspirasi antara ditingkat elit politik dan masyarakat. Juga dalam perspektif politik komunikasi diartikan Kantraprawira (2002 : 64) sebagai usaha menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat baik pikiran intern golongan, instansi, asosiasi, ataupun sektor kehidupan pemerintah. Artinya melalui komunikasi pikiran politik dapat dipertemukan karena pada hakikatnya segala pikiran (gagasan, ide, informasi, opini, dan lain-lain) itu harus ada yang menyampaikannya melalui pesan dan akhirnya ada yang menerima atau menanggapi. Konsep komunikasi yang dikemukakan oleh Rusadi tersebut, dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu : Pertama, komunikasi sebagai kegiatan politik. Artinya komunikasi merupakan penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lain. Kegiatan yang dilakukan secara nyata dalam kehidupan sosial. Kedua, komunikasi sebagai kegiatan ilmiah. Artinya komunikasi merupakan salah satu kegiatan politik dalam sistem politik, sebagaimana pendapat Almond.

Kemudian timbul suatu anggapan, bahwa komunikasi mencakup politik. Banyak aspek dalam kehidupan politik yang dapat dilukiskan sebagai komunikasi. Namun sebaliknya para ilmuwan politik memandang bahwa sesungguhnya politik meliputi komunikasi karena banyak definisi komunikasi yang telah ada "ternoda" oleh politik, artinya komunikasi telah melintas bidang kajian politik karena politik juga meliputi pengaruh disamping kekuasaan dan wewenang (V.J. Bell 1975 : 15 dalam Arifin, 2003 : 5).

